

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)

H.K Martono, *Transportasi di Perairan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006)

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Angkutan Di Perairan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran Utama

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015
Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) *Online*

Jurnal

Agus Santosa, dan Erwin Alexander Sinaga, “Peran Tanggung Jawab Nakhoda Dan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Melalui Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”, *Jurnal Saintek Maritim*, Volume 20 Nomor 1, Tahun 2019

Dedeh Suryani, Aprilia Yudi Pratiwi, dan Andi Hendrawan, “Peran Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran”, *Jurnal Saintara*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2018

Edward Mandala, dan Rendra Setyadiharja “Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2016

Elly Kristiani Purwendah, dan Agoes Djatmiko, “Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Di Laut Oleh Kapal Tanker”, *Jurnal Perspektif*, Volume XX Nomor 1, Tahun 2015

- Kurnia Setiawan, “Syahbandar Dalam Penerapan Standar Keamanan Pelayaran Di Pelabuhan Sri Mandah Kecamatan Moro (Studi Kasus Pada Boat Pancung di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun 2016)” Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, Tahun 2018
- Ni Putu Suci Meinarni, “Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montana Di Laut Timor”, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Nomor 2 Volume 2, Tahun 2016
- Rahel Angel Rosalin Silaban, “Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan*, Volume 5, Tahun 2018
- Rahmy Paramitha Amiruddin, Guasman Tatawu, dan Kamaruddin Jafar, “Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 1 Issue 2, Tahun 2019
- Randy Y.C. Aguw, “Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, *Lex Administratum* Volume 1 Nomor 1, Tahun 2013
- Sonhaji, “Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 1 Edisi 3, Tahun 2018
- Surahman, “Kelaiklautan Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak”, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2015
- Triswan Suseno, “Analisis Pola Distribusi Logistik Dan Infrastruktur Batubara Untuk PLTU Skala Kecil”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Nomor 1 Volume 13, Tahun 2017

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kapal>, diakses pada tanggal 1 April 2020

LAMPIRAN

Surat Balasan Permohonan Ijin Riset

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS		
	Jl. Yos Sudarso No. 30 Semarang - 50174	Telp. (024) 3540687	Faximile : (024) 3582335 Email : adpeltanjungemas@yahoo.co.id

Nomor	: SM.106/ 027 11 /KSOP.Tg.Emas-2020	Semarang, 12 Maret 2020
Klasifikasi	: -	
Lampiran	: -	
Perihal	: Persetujuan Penelitian	

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

di

SEMARANG

1. Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) nomor 1658/UN7.5.1.2/DL/2020 tanggal 14 Februari 2020 Perihal Permohonan Riset / penelitian, dengan ini disampaikan pada prinsipnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas dapat memberikan ijin melakukan Riset / Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Fungsi Syahbandar-Pelabuhan Tanjung Emas Terhadap Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Tongkang Batubara di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang" kepada :

N a m a	: QINTARA QANITAN NUR AZHARI
N I M	: 11010116120158
Bidang Minat	: Hukum Tata Negara
2. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS**


Ir. JUNAIDI, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630814-109403 1 002